

## DAFTAR ISI

<b><u>A.</u></b>	<b><u>LATAR BELAKANG</u></b>	<b><u>101</u></b>
<b><u>B.</u></b>	<b><u>TUJUAN</u></b>	<b><u>101</u></b>
<b><u>C.</u></b>	<b><u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u></b>	<b><u>101</u></b>
<b><u>D.</u></b>	<b><u>UNSUR YANG TERLIBAT</u></b>	<b><u>102</u></b>
<b><u>E.</u></b>	<b><u>REFERENSI</u></b>	<b><u>102</u></b>
<b><u>F.</u></b>	<b><u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u></b>	<b><u>102</u></b>
<b><u>G.</u></b>	<b><u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u></b>	<b><u>103</u></b>
	<b>LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS</b>	<b>104</b>
	<b>LAMPIRAN 2 : STRUKTUR ISI LAPORAN ANALISIS KONTEKS</b>	<b>105</b>

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan telah disusun, disosialisasikan, digandakan, dan disebarluaskan ke satuan pendidikan dan pihak-pihak yang terkait.

Disamping itu, Kementerian Pendidikan Nasional telah menerbitkan peraturan tambahan termasuk petunjuk pelaksanaan dan rambu-rambu lainnya untuk menunjang pemahaman SNP. Adanya peraturan, aturan tambahan, dan pedoman-pedoman yang merupakan payung hukum dalam pengelolaan pendidikan, dengan harapan agar satuan pendidikan memiliki acuan yang jelas dalam upaya memenuhi pencapaian SNP.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bintek KTSP di SMA pada tahun 2009 diperoleh data dan informasi, antara lain: 1) masih banyak sekolah yang belum melakukan analisis SNP, belum semua warga sekolah memahami tata cara menganalisis standar nasional pendidikan; 2) sekolah yang sudah melakukan analisis konteks tidak mendokumentasikan hasil analisisnya dengan baik; 3) sekolah belum memanfaatkan hasil analisis konteks dalam penyusunan KTSP dan program sekolah. Dengan demikian masih banyak sekolah yang telah melakukan analisis, tetapi belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena sekolah belum memahami bahwa dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan di satuan pendidikan.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan dalam hal memahami dan menterjemahkan SNP menyebabkan satuan pendidikan mengalami kesulitan dalam menyusun analisis konteks yang meliputi analisis SNP, analisis kondisi satuan pendidikan, dan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan. Guna menjawab dan sekaligus mengatasi permasalahan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMA menyusun “Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Analisis Konteks”.

Dalam penyusunan laporan analisis konteks terlebih dahulu dilakukan analisis standar nasional pendidikan, analisis kondisi satuan pendidikan, dan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan. Dengan adanya juknis ini diharapkan satuan pendidikan dapat terbantu dalam proses pemahaman dan pemenuhan SNP sehingga satuan pendidikan mampu menyusun program dan melaksanakannya.

## B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam penyusunan Laporan Analisis Konteks sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

## C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup juknis laporan analisis konteks ini mencakup kegiatan:

1. Rapat persiapan dan koordinasi untuk menyusun laporan analisis konteks.
2. Pengumpulan dokumen hasil analisis SNP, hasil analisis kondisi satuan pendidikan, dan hasil analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
3. Pengolahan dan interpretasi data hasil analisis.
4. Penyusunan draf laporan hasil analisis konteks.
5. Review dan revisi draf laporan hasil analisis konteks.
6. Finalisasi laporan hasil analisis konteks.
7. Pengesahan laporan hasil analisis konteks.

8. Penggandaan dan pendistribusian laporan hasil analisis.

#### **D. Unsur Yang Terlibat**

1. Kepala sekolah
2. Tim kerja
3. Komite Sekolah

#### **E. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 dan No mor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan .
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah .
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses .
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

#### **F. Pengertian dan Konsep**

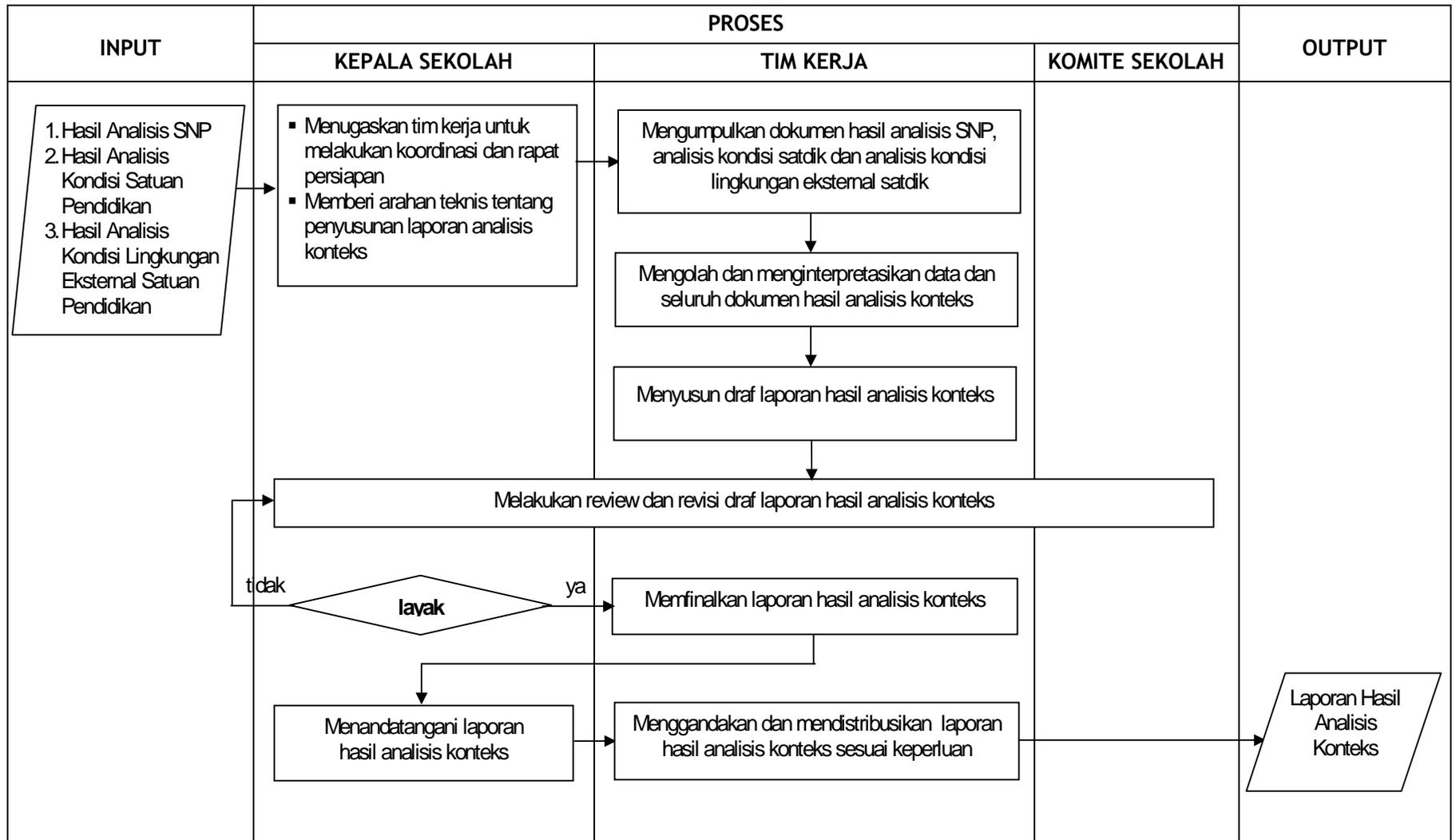
1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1).
2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1).
3. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1).
4. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1).
5. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1).

6. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1.)
7. Analisis konteks meliputi:
  - a. Analisis standar nasional pendidikan yang meliputi: analisis standar isi, analisis standar kompetensi lulusan, analisis standar proses, analisis standar pengelolaan dan analisis standar penilaian.
  - b. Analisis kondisi satuan pendidikan.
  - c. Analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
8. Analisis kondisi satuan pendidikan adalah analisis tentang kekuatan dan kelemahan kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program (Panduan penyusunan KTSP dari BSNP, Bagian IV.A).
9. Analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan adalah analisis tentang peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya (Panduan penyusunan KTSP dari BSNP, Bagian IV.A).
10. Laporan analisis konteks adalah dokumen yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menggambarkan serangkaian kinerja awal satuan pendidikan dalam rangka memahami, mempersiapkan kegiatan analisis terhadap SNP, satuan pendidikan, dan lingkungan satuan pendidikan;
11. Tim kerja sekolah adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bertugas untuk mengumpulkan dokumen hasil analisis, mengolah data dan informasi hasil analisis, menginterpretasikan hasil analisis, dan menyusun laporan analisis konteks, yang terdiri atas wakil kepala sekolah, TPK sekolah, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota;

#### **G. Uraian Prosedur Kerja**

1. Kepala sekolah menugaskan kepada tim kerja untuk melakukan koordinasi dan rapat persiapan untuk menyusun laporan analisis konteks.
2. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang penyusunan laporan analisis konteks kepada tim kerja antara lain mencakup tujuan, hasil yang diharapkan, mekanisme kerja dan unsur yang terlibat dalam pembuatan laporan analisis konteks.
3. Tim kerja mengumpulkan dokumen hasil analisis yang mencakup hasil analisis SNP, hasil analisis kondisi satuan pendidikan, dan hasil analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan untuk dianalisis sebagai bahan laporan.
4. Tim kerja mengolah dan menginterpretasikan data seluruh dokumen hasil analisis konteks.
5. Tim kerja menyusun draf laporan hasil analisis konteks.
6. Kepala sekolah bersama tim kerja dan komite sekolah melakukan reviu dan revisi draf laporan hasil analisis konteks.
7. Tim kerja memfinalkan laporan hasil analisis konteks yang telah direview.
8. Kepala sekolah menandatangani laporan hasil analisis konteks.
9. Tim kerja menggandakan laporan analisis konteks sesuai kebutuhan dan mendistribusikan kepada dewan guru, komite sekolah dan pihak lain yang memerlukan, sebagai bahan untuk penyusunan KTSP dan penyusunan rencana kerja sekolah.

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Penyusunan Laporan Analisis Konteks



## Lampiran 2 : Struktur Isi Laporan Analisis Konteks

### 1. Sampul/Cover (*contoh terlampir*)

Sekurang-kurangnya memuat:

- a. Logo sekolah atau logo pemerintah kabupaten/kota dimana sekolah tersebut berada .
- b. Nama “LAPORAN HASIL ANALISIS KONTEKS”.
- c. Satuan Pendidikan (Nama Sekolah).
- d. Tahun Pelajaran.
- e. Kabupaten/Kota dan Provinsi tempat sekolah tersebut berada.

### 2. Kata Pengantar

Sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ucapan syukur atas tersusunnya laporan analisis konteks .
- b. Proses penyusunan laporan analisis konteks .
- c. Tujuan dan manfaat disusunnya laporan analisis konteks .
- d. Ucapan terima kasih pada pihak yang telah berpartisipasi .
- e. Tanda tangan Kepala Sekolah .

### 3. Lembar Pengesahan

Sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pemberlakuan secara menyeluruh .
- b. Masa berlakunya .
- c. Legalitas formal berupa tanda tangan kepala sekolah .

### 4. Daftar Isi

Memuat semua hal yang ada dalam laporan analisis konteks yang disusun, dilengkapi dengan halaman.

### 5. Batang Tubuh yang memuat:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### A. Latar Belakang

Memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi ideal yang diharapkan sekolah.
- 2) Kondisi riil sekolah.
- 3) Upaya atau langkah sekolah untuk memenuhi kondisi ideal.

##### B. Dasar Kebijakan

Memuat landasan hukum yang digunakan dalam menyusun laporan analisis konteks .

##### C. Tujuan dan Manfaat

- 4) Memuat tujuan penyusunan laporan analisis konteks .
- 5) Memuat manfaat yang diharapkan dengan adanya laporan analisis konteks .

#### **BAB II. HASIL ANALISIS KONTEKS**

##### A. Analisis Standar Nasional Pendidikan

###### 1. Analisis Standar Isi

Memuat deskripsi hasil analisis standar isi yang sekurang -kurangnya memaparkan kondisi riil pelaksanaan standar isi , kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

###### 2. Analisis Standar Kompetensi Lulusan

Memuat deskripsi hasil analisis standar kompetensi lulusan yang sekurang -kurangnya memaparkan kondisi riil pencapaian standar kompetensi lulusan, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

###### 3. Analisis Standar Proses

Memuat deskripsi hasil analisis standar proses yang sekurang-kurangnya memaparkan kondisi riil pelaksanaan standar proses, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

4. Analisis Standar Pengelolaan

Memuat deskripsi hasil analisis standar pengelolaan yang sekurang-kurangnya memaparkan kondisi riil pelaksanaan standar pengelolaan, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

5. Analisis Standar Penilaian

Memuat deskripsi hasil analisis standar penilaian yang sekurang-kurangnya memaparkan kondisi riil pelaksanaan standar penilaian, kondisi yang diharapkan sesuai dengan kondisi ideal (SNP) dan rencana tindak lanjut untuk memenuhinya. Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

B. Analisis Kondisi Satuan Pendidikan

Memuat deskripsi hasil analisis kondisi satuan pendidikan yang sekurang-kurangnya memaparkan:

- 1) kekuatan dan kelemahan kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
- 2) rencana tindak lanjut.

Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

C. Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan

Memuat deskripsi hasil analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan yang sekurang-kurangnya memaparkan:

- 1) peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.
- 2) rencana tindak lanjut.

Deskripsi tersebut dapat didukung oleh data kuantitatif.

### **BAB III. PENUTUP**

A. Kesimpulan.

B. Rekomendasi.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**